

BAB IV

KEBANGKITAN SISTEM PERTAHANAN JEPANG

Hampir setengah abad pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II telah membentuk model dan pola perpolitikan ekonomi maupun kemanan Jepang yang pasif. Permainan manuver perpolitikan Jepang yang terkesan bermain aman karena posisi aliansinya dengan Amerika Serikat saat ini sdah tidak bisa dijadikan “payung” kemanan lagi. Perubahan tatanan politik, munculnya ancaman-ancaman terbaru diberbagai sektor seperti ekonomi, kemanan, teknologi, maupun budaya kini bertambah kompleks karena perkembangan inovasi industri.

Negara-negara berlomba membenahi kapasitas negaranya dalam berbagai sektor untuk mengimbangi perkembangan yang ada terutama untuk menanggapi isu-isu *high politic* untuk melindungi kedaulatan negaranya. Tren isu pertahanan dan keamanan saat ini mulai sejajar kembali dengan isu ekonomi setelah isu kemanan sempat dikesampingkan pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Di masa tersebut hampir semua negara menaruh ekonomi sebagai prioritas utama, hanya beberapa negara adi daya yang konsen pada bidang pertahanan dan militernya. Namun saat ini hampir semua negara didunia menaruh konsen pada sisi kemanan dan pertahanan mereka.

Dewasa kini isu-isu yang berkembang tidak terlepas dari perihal militer yang ikut melekat pada setiap isunya, misalnya isu ekonomi yang terkait dengan keamanan ekonomi, isu teknoligi yang terkait dengan kemanan teknologi

khususnya di dunia maya, dan isu-isu terkait hubungan antar negara yang berujung konflik langsung maupun tidak langsung.

Pada kenyataan perkembangan dunia yang dinamis, Jepang tidak bisa untuk terus menerus bersikap pasif jika Jepang tidak ingin menjadi sasaran empuk negara-negara yang semakin meningkatkan kapasitas negaranya diberbagai sektor terutama sisi pertahanan dan keamanan. Shinzo Abe merupakan tokoh yang menyadari akan kebutuhan tranformasi pola pertahanan Jepang untuk bangkit menjadi negara yang mandiri. Kebangkitan sistem pertahanan Jepang kearah kemandirian adalah sebuah kebutuhan untuk bertahan sekaligus untuk melangkah maju dikancah politik internasional.

Beberapa faktor yang memacu Jepang dalam merubah sistem pertahanannya dalam skripsi ini di dasari pada teori William D. Coplin, keberadaan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri, faktor perekonomian Jepang yang sudah harus ditunjang dengan sistem pertahanan dan kemanan, serta faktor eksternal dari interkasi antar negara yang menimbulkan konflik antara Jepang dengan negara tetangganya Tiongkok dan Korea Utara. Dan persetujuan Amerika Serikat terhadap arah perubahan sistem pertahanan Jepang akan dibahas pada bab ini.

A. Peran Partai *Liberal Democratic Party* (LDP) dan Shinzo Abe Dalam Peningkatan Militer Jepang

Pemerintahan Jepang saat skripsi ini ditulis berada dibawah kepemimpinan Shinzo Abe dari LDP (*Liberal Democratic Party*) yang telah menjabat sebagai

Perdana Menteri Jepang sebanyak 3 kali yaitu, tahun 2006-2007, 2012-2014, 2014 hingga sekarang.

Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang sudah mengambil peran penting dalam hal mengambil keputusan perihal keamanan Jepang. Sejak dimulainya Perang Dingin dalam tatanan dunia bipolar LDP yang berkuasa pada saat itu memilih menyelaraskan perihal keamanan negaranya di bawah naungan AS dan menekankan pada pemulihan ekonomi. Namun rasa anti Amerika tetap kuat karena bergabung dengan Uni Soviet pada saat itu bukanlah alternatif yang baik bagi Jepang untuk meningkatkan ekonomi.

Arus politik di Jepang pada abad ke-21 cenderung terbagi ke dalam ideologi neokonservatisme, neo-Asianisme, nasionalisme, dan pasifisme. LDP sejak 2001 dilihat sebagai neokonservatif dan banyak tokoh elitnya yang memiliki nasionalisme yang tinggi, salah satunya Shinzo Abe. Nasionalisme dan neokonservatisme dianggap sebagai kekuatan pendorong militerisasi sedangkan pasifisme dan neo-Asianisme dianggap kontra.

Kubu neokonservatif menginginkan kemandirian dengan kesetaraan, pergerakan mereka adalah mendorong revisi konstitusi, sikap proaktif di bidang internasional, kebangkitan sentimen nasionalistik, serta kebijakan garis keras terhadap Cina dan Korea Utara.¹¹⁰

¹¹⁰ David Arase. Japan, the Active State?: Security Policy after 9/1. Dalam *Jurnal Asian Survey* Vol. 47, No. 4 (July/August 2007), pp. 560-583

Meskipun nasionalis hanyalah sebagian kecil dari LDP, mereka adalah minoritas yang terus berkembang. Nasionalis menginginkan kedaulatan, otonomi melalui kekuatan militer, dan mau menggunakan kekuatan, tidak hanya defensif, tetapi juga preventif. Oleh karena itu mereka lebih menyukai jika pasal 9 dihapuskan dan aliansi keamanan AS-Jepang berakhir. Nasionalis menekankan pentingnya militer resmi dengan defensif dan kemampuan ofensif, Meskipun nasionalis dianggap ekstrim, ide mereka tentang otonomi telah mendapatkan popularitas di kalangan publik mungkin juga mempengaruhi rekan neokonservatif mereka untuk menghidupkan nasionalisme.

Seperti halnya ide penangkal nuklir sebagai pengganti payung nuklir AS. Bahkan Nakagawa Shoichi, ketua Dewan Riset Kebijakan LDP, mengklaim konstitusi tidak melarang senjata nuklir sebagai pencegahan, oleh karena itu ketiga prinsip non-nuklir harus direvisi. Dan sikap Abe adalah membiarkan debat perihal ini tetap hidup.

Tahun 2012 LDP mendapatkan kembali kekuasaan dengan diangkatnya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri. LDP didukung AS dalam *containment policy* terhadap Cina. Pada tahun 2010 Cina melampaui perekonomian Jepang sebagai negara dengan perekonomian terpesat kedua di dunia, selanjutnya Cina juga menunjukkan peningkatan agresifitas dalam klaim teritorial maritim Laut Cina Timur dan Selatan. Hak tersebut tidak hanya mengancam negara tetangganya melainkan hegemoni AS di Asia-Pasifik pun terancam.

Devin T. Stewart dan Jeffrey Wasserstrom menyebutkan bahwa ada kesamaan faktor yang memuluskan jalan kekuasaan Abe dan populernya para politisi populis sayap kanan di berbagai belahan dunia: kecemasan ekonomi, turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap elit-elit politik lantaran korupsi, dan serta penonjolan identitas kebangsaan saat menghadapi ancaman asing.

Terpilihnya Abe pada 2012 dimungkinkan oleh kegagalan Partai Demokratik Jepang menstabilkan ekonomi dan memenuhi janji meninjau ulang keberadaan pangkalan militer AS di Okinawa, dan yang paling vital dari itu semua, bencana nuklir Fukushima pada 2011.¹¹¹

Shinzo Abe adalah salah satu tokoh Perdana Menteri Jepang yang secara konsisten berupaya melakukan perubahan terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang. Kepasifan yang diciptakan dari pasal tersebut Ia rasa sudah sangat tidak bisa diandalkan untuk tetap menjaga kedaulatan pertahanan Jepang dari meningkatnya kapasitas pertahanan militer Tiongkok maupun perkembangan rudal dan nuklir Korea Utara.

Paska kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II Jepang menjalankan konstitusi 1947 yang mempengaruhi postur dan pola pertahanan serta militer Jepang yang pasif. Keberadaan pasal 9 dalam konstitusi tersebut mengkebiri kekuatan dan keberadaan militer Jepang yang, dan menahan Jepang dari berbagai elemen-elemen militer yang umumnya dimiliki negara lain. Keterbatasan ini menjadi masalah tersendiri dan telah menjadi sebuah ancaman yang nyata ketika

¹¹¹ Bary Buzan dan Lene Hansen. *The Evolution of International Security Studies*, Cambridge University Press, 2009

situasi internasional di sekitar Jepang berubah menjadi semakin tidak aman dan isu mengenai militer semakin dinamis.

Oleh karena itu Shinzo Abe sebagai perdana menteri membawa spekulasi bahwa Jepang harus membenahi sektor pertahanan dan militernya. Pada masa pemerintahannya yang pertama di tahun 2006, Abe sempat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bernada kanan seperti meningkatkan patriotisme, yang cenderung mengarah pada peningkatan kemampuan militer Jepang. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi salah satu penyebab turunnya popularitas Abe, membawanya turun dari jabatan perdana menteri.

Pada masa pemerintahannya yang kedua, Abe tetap kembali mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait peningkatan pertahanan dan militer Jepang, Ia telah mencanangkan terbitnya konsep *Dynamic Defense Force* di tahun 2010. Di masa jabatannya yang kedua ini Ia Hal tersebut dikarenakan Abe memiliki posisi dan tetap dapat mempertahankan jabatannya dan kritik masyarakat semakin menurun, Ia memiliki legitimasi yang lebih kuat dari sebelumnya, dengan dukungan dari *Liberal Democratic Party* (LDP) sebagai partai mayoritas yang menguasai parlemen. Kuatnya sumber legitimasi Abe juga disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Asia Timur yang membuka pandangan bahwa pembaharuan sistem pertahanan merupakan sebuah keharusan dan hal ini membuat ambisi Abe berkenaan dengan isu pertahanan dan kemanan termasuk perubahan konstitusi tersebut menjadi mudah diterima.

Shinzo Abe adalah Perdana Menteri pertama yang lahir pasca Perang Dunia sekaligus perdana menteri termuda sepanjang sejarah Jepang. Abe

mempunyai “darah” sebagai seorang aristokrat. Kakeknya adalah mantan Perdana Menteri Jepang tahun 1957-1960 yaitu Nobusuke Kishi, yang sekaligus pernah dipenjara selama tiga tahun karena dianggap sebagai penjahat perang pada Perang Dunia II. Bagi Abe, kakeknya merupakan salah satu pijakannya dalam berpolitik.

Pertama, yaitu pengaruh kakeknya yang memulai perjalanan imperialis yang kemudian menjadi arsitek kebangkitan Jepang pasca perang. Karena bagi Abe sosok Kishi adalah sosok pahlawan dalam membangkitkan kembali Jepang. Kekaguman Abe tertuai pada buku yang dirilis pada tahun 2006 Utsukushii Kuni (*Toward beautiful Country*).¹¹²

Kedua adalah mentalitas Abe sebagai generasi muda yang tidak ingin melihat Jepang selalu dipersalahkan dalam perang dunia. Bagi Abe dan Koizumi menyadari bahwa mereka mewarisi kebijakan luar negeri yang pasif. Jepang mempunyai peran yang sangat minim dalam penataan keamanan internasional akibat munculnya kekhawatiran masyarakat internasional akan kembali munculnya militerisme Jepang. Setelah setengah abad Jepang tunduk pada tatanan internasional yang menyudutkan Jepang, dan kini tak perlu lagi Jepang dikaitkan dengan kesalahan perang saat Perang Dunia II.¹¹³ Katz menambahkan: “*he argues that since Japan has been peaceful, economically vibrant, a good neighbor, and a contributor to international peace for over 60 years now, there is no more need for war guilt.*”¹¹⁴

¹¹² “Abe Shinzo and Japan’s Change of Course”, *Loc. Cit.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Katz, *Op. Cit.* Hal. 81

Kemenangan LDP ini dapat dilihat sebagai indikasi kembali lahirnya nasionalisme Jepang. Rasa nasionalisme ini menandai momentum kebangkitan Jepang setelah selama dua dekade mengalami stagnasi ekonomi serta politik negaranya. Pertama, PM Noda dianggap gagal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti persoalan ekonomi nuklir Fukushima dan pemulihan pasca tsunami. Kepemimpinan Partai Demokrat Jepang (DPJ) juga lemah dalam menangani isu-isu persengketaan kawasan dengan Tiongkok dan Korea Utara. PM Noda dianggap lembek dan lamban dalam merespon provokasi dua negara tersebut. Kedua, di sisi lain, Shinzo Abe bak magnet bagi para pemilih Jepang khususnya kawula mudanya. Janjinya membawa Jepang lebih asertif dengan usulan radikal menguatkan kemampuan militer Jepang.

Salah satu langkahnya dengan rencana mengubah konstitusi Jepang khususnya Artikel 9 yang selama ini membatasi kekuatan militer Jepang sebatas sebagai kekuatan pembela diri semata (*self defense forces*). Sisi radikal dari LDP yang konservatif ini sebenarnya wujud kelihaihan Abe memanfaatkan momentum. Ia mampu mengevaluasi kelemahan Noda dalam merespons perkembangan domestik dan memanasnya sengketa domestik yang butuh penanganan lebih dari sekadar hanya *play by the book*.

Ketiga, posisi Amerika Serikat (AS) yang masih sentral dalam hubungan dengan Jepang menjadi salah satu kunci penentu kebangkitan Jepang. Dengan menghangatnya konflik kawasan Asia Timur termasuk uji coba persenjataan Korea Utara hingga insiden pengintaian pesawat Tiongkok di teritorial Jepang, AS berkepentingan memproteksi Jepang, sebagai sekutu. Kemungkinan konstitusi

berubah dengan restu AS pun bisa terjadi sama ketika AS merancang konstitusi Jepang pasca- Perang Dunia II. Ketiga hal di atas yang dapat dimaknai sebagai pertanda kebangkitan nasionalisme Jepang memang bukan hal yang sama sekali baru. Kasus sengketa wilayah di Asia Timur juga seringkali terjadi sepanjang sejarah konflik antara Jepang, Tiongkok, dan Korea Utara.¹¹⁵

Namun, kali ini mendapatkan rasa yang baru ketika persoalan tersebut sampai pada menyulut reaksi domestik di Jepang maupun Tiongkok yang cukup masif. Di samping itu, konflik ini sebenarnya juga harus dilihat sebagai suatu gambaran yang lebih luas tentang dinamika kawasan yang saat ini terjadi, termasuk konflik laut Tiongkok selatan yang menyeret perhatian negara-negara besar di dalamnya.

Kemenangan LDP ini pun memang baru awal bagi perjalanan berat kepemimpinan Abe di panggung politik sebagai PM pasca lengsernya Noda. Abe tidak boleh hanya sekadar menjadikan isu-isu populis untuk memenangkan pemilu semata. Tantangan riil Abe adalah mewujudkan titik krusial yang ia tawarkan dalam pemilu dan berbagai kesempatan di hadapan publik sebagai hal yang nyata direalisasikan.

Isu utama memang masih seputar ekonomi dan diplomasi. Di bidang ekonomi salah satunya membenahi perekonomian Jepang dengan lebih melakukan kebijakan moneter yang menjaga nilai tukar yen sedemikian rupa sehingga menggeliatkan kembali industri Jepang. Secara khusus tantangannya adalah memberikan daya saing yang menguntungkan bagi eksportir Jepang.

¹¹⁵ “Abe Shinzo and Japan’s Change of Course” *Loc. Cit.*

.Dari sisi diplomasi yang paling penting adalah meyakinkan AS untuk tetap menjadi sekutu Jepang dengan memberikan ruang Jepang untuk lebih bisa berperan secara tegas dan kuat, khususnya dalam peningkatan kemampuan pertahanan. Langkah diplomasi yang penting dilakukan Abe adalah melakukan pendekatan khusus kepada AS. Abe perlu mendorong redefinisi hubungan kemitraan AS-Jepang baru setelah hubungan yang selama berjalan monoton.

Saat inilah momentumnya untuk melakukan redefinisi dan rekonfigurasi hubungan dua negara dengan mempertimbangkan kontestasi kekuatan yang sedang terjadi di Asia Timur dengan tetap bertujuan meraih keuntungan saling menguntungkan bagi AS-Jepang. Salah satu pintunya melalui kemungkinan revisi konstitusi, khususnya pembahasan tentang pengembangan kekuatan militer yang lebih kuat dan mandiri.¹¹⁶

Perdanan Mentersi Shinzo Abe mewarisi banyak pekerjaan yang belum selesai pada era Koizumi. Kepopuleran dan kinerja Koizumi sering menjadi bahan keraguan apakah Abe cukup mampu menggantikan Koizumi. Kepopuleran Abepun berada di bawah Koizumi. Akan tetapi peran internasional Jepang yang semakin meningkat dalam berbagai sektor, dipahami Abe sebagai isyarat bahwa Jepang harus menjadi negara yang mandiri terutama dalam bidang keamanan. Terinspirasi oleh kebijakan Kishi yang merenegosiasi perjanjian keamanan Amerika Serikat-Jepang pada tahun 1960, Abe juga mempunyai keinginan Jepang kembali menjadi "*normal contry*" mempunyai konstitusi tersendiri, mengajarkan

¹¹⁶ Tirta N. Mursitama Phd, Artikel "Menanti Kebangkitan Jepang" 28 Desember 2012. Diakses dari <http://ir.binus.ac.id/2012/12/28/menanti-kebangkitan-jepang/>

patriotisme di sekolah-sekolah, dan menumpuk peran keamanan internasional yang lebih tinggi.

Keinginan Abe ini mendapatkan respon positif di parlemen. Kelompok kiri di parlemen yang diwakili DPJ serta kelompok kanan. Partai pengusung Abe yaitu LDP mendukung gagasan peningkatann peranan Jepang dalam keamanan internasional. Bahhkan keduanya mempersilahkan Abe untuk merencanakan revisi khususnya pasal 9, sehingga Jepang akan mempunyai angkatan perang.

Dalam tubuh parlemen, memang muncul kelompok konservatif. Abe tidak menolak untuk dimasukan ke dalam kelompok konservatif. Baginya kelompok konservaif bukanlah suatu ancaman ataupun ideologi, melainkan bagaimana memikirkan Jepang kini dan esok, sekaligus penghargaan terhadap pendahulunya. Pandangan Abe ini menunjukkan bahwa Abe adalah sosok yang bangga terhadap bangsanya sendiri. Sosok pemimpin yang sangat peduli dengan perkembangan regional, khususnya Asia Timur. Ia melihat dua kekuatan utama sedang berbenah diri yakni Tiongkok dan Korea Utara. Oleh karenanya, Abe segera berbenah diri untuk memulai langkah Jepang untuk mengglobalkan peran keamanannya.

Beberapa bulan menjabat Shinzo Abe mengumumkan berdirinya Kementrian Pertahanan (*Ministry of Defense*) dengan menaikan status Badan Pertahanan tanggal 9 Januari 2006. Keputusan ini mengejutkan masyarakat internasional mengingat ini adalah pertama kalinya Jepang mempunyai kementrian pertahanan setelah Perang Dunia. Bahkan Abe segerea menyusun rencana untuk segera melengkapi lembaga pertahannya dengan merencanakan

membentuk dua badan lagi yakni Badan Intelijen Negara dan Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*).

Dua nilai yang dimiliki Jepang yaitu kerja keras dan patriotisme. Dari sisi Abe peningkatan postur militer adalah sebuah keharusan karena merupakan keharusan kepentingan nasional yang menghendakinya. Selain itu Jepang tidak selalu dapat mengandalkan Amerika Serikat karena adanya perbedaan kepentingan, misalnya dalam hal mendukung pencalonan Jepang dalam menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Shinzo Abe harus mengandalkan kebijakan serta pertahanannya sendiri serta peningkatan hubungan dengan Washington. Dengan postur yang lebih kuat ia akan memainkan peran bilateral dengan Tiongkok, Korea Selatan dan Rusia tetapi ia tidak dapat meninggalkan persekutuan lamanya dengan Amerika Serikat. Abe bisa dikatakan lebih maju dan lebih berani dari Koizumi yang terkenal pro Washington.

Shinzo Abe mengatakan bahwa negara-negara lain tidak perlu khawatir atas keputusan negerinya meluncurkan secara penuh Lembaga Kementerian Pertahanan sejak Perang Dunia II. “Peningkatan dari badan menjadi kementerian tidak berarti sebuah ekspansi anggaran militer atau kekuatan militer. Tapi lebih menunjukkan komitmen kami dalam memberikan kontribusi perdamaian dan stabilitas kawasan.” Kata Abe dalam sebuah pidato di Tokyo.¹¹⁷

Perekonomian Jepang yang dikenal berkembang pesat, sempat mengalami *collaps* pada tahun 2000-an. Hal ini dikarenakan kebijakan uang ketat dan pendanaan aset properti yang dikeluarkan *Bank of Japan*, akibatnya Jepang

¹¹⁷ “Kementerian Pertahanan Jepang Bukanlah Sebuah Ancaman”, Kompas 16 Januari 2007. Dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2007/01/16/brk.20070116-91373.id.html>

menghadapi kredit bermasalah dengan jaminan saham dan tanah. Di tahun 2001 dimana masa pemerintahan Junichiro Koizumi berhasil membawa Jepang keluar dari perekonomian yang lesu dan tak bergairah melalui berbagai reformasi ekonomi. Reformasi tersebut telah menunjukkan dampaknya dalam berbagai aspek seperti perburuhan asing, investasi dan perdagangan dengan beberapa negara. Namun keberhasilan Koizumi dalam memberikan perubahan ekonomi yang lebih baik, tidak diimbangi dengan memelihara hubungan kekerabatan yang baik dengan Tiongkok.¹¹⁸

Pasalnya di masa pemerintahan Koizumi, hubungan Tokyo dan Beijing yang sebelumnya mulai membaik kembali menjadi memburuk karena kunjungan rutin Koizumi ke Kuil Yasukuni sejak tahun 2001 sampai dengan 2006. Kuil Yasukuni merupakan kuil yang dibangun sebagai pemakaman arwah pahlawan perang Nanjing termasuk 14 orang diantaranya adalah penjahat perang kelas “A”. Kedatangan Koizumi tersebut dimaksudkan untuk menghormati arwah prajurit Jepang yang tewas selama perang. Hal tersebut membangkitkan kemarahan masyarakat internasional terutama Tiongkok dan Korea yang mendapat dampak dari kekejaman militer Jepang semasa Perang Dunia II.

Setelah berselang beberapa tahun ketegangan keduanya mulai menurun. Di tahun 2006 PM Shinzo Abe segera menjernihkan hubungan keruh yang sempat terjadi dalam masa pemerintahan Koizumi, antara Jepang dengan tetangga dekatnya yaitu Tiongkok. Abe melakukan kunjungan luar negerinya yang pertama dengan mengunjungi Tiongkok. Pilihan Abe menjadikan Tiongkok sebagai negara

¹¹⁸ “Japan Longing for Lionheart, Political Nostalgia for The Koizumi Era, but is it really over?”, 19 Juli 2007 diakses <http://www.economist.com/node/9518704/>

yang pertama dikunjungi memiliki makna simbolis yang penting, mengingat keduanya memiliki ketergantungan yang sama dalam kerjasama ekonomi yang nantinya akan menguntungkan satu sama lain.

Kerjasama yang saling menguntungkan berlanjut di tahun 2009, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Wang Qishan memimpin delegasi dari Beijing bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Hirofumi Nakasone untuk melakukan pertemuan ekonomi. Pertemuan ini dirancang untuk membahas masalah ekonomi dan bidang-bidang lainnya secara bersama. Agenda utama pembicaraan akan termasuk langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi global, hubungan perdagangan dan investasi antara kedua raksasa ekonomi Asia tersebut.¹¹⁹

Shinzo Abe sosok Perdana Menteri Jepang yang nasionalis berambisi untuk menormalisaikan postur militer Jepang, meskipun menjadi kontroversi dan menimbulkan kritik internasional. Shinso Abe tetap akan bersikeras untuk meningkatkan keuangan militer Jepang yang akan disahkan pada majelis tinggi yang dikendalikan oleh koalisi Perdana Menteri Shinzo Abe, hal tersebut merupakan pergeseran terbesar dalam kebijakan pertahanan dalam setengah abad.

“Japan is facing a turning point of its security policy,” kata Tomoaki Iwai, professor of politics at Nihon University in Tokyo.¹²⁰ Yang Abe inginkan dari menormalisasi postur militer Jepang adalah menghilangkan batasan-batasan *self*

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ “Japan Set to Pass Security Bills Despite Widespread Protest” *The Guardian*, 17 September 2015. Diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2015/sep/17/japan-to-pass-security-bills-despite-protests> pada 20 Oktober 2015

defense dan *aid missions* yang diatasi konstitusi pasifis yang dikenakan oleh AS setelah perang dunia kedua.

“The security situation surrounding our country has changed much more than we imagined,” the premier told parliament on Monday. “The legislation is essential in order to protect our people’s lives and peaceful livelihood, and it is necessary to put the legislation in place as soon as possible,” Ia menambahkan.¹²¹

Abe berpendapat bahwa perubahan ini diperlukan karena ancaman dari Tiongkok semakin agresif dan Korea Utara tidak stabil. Walaupun posisi kontra menafsirkan hal ini ditujukan untuk melindungi sekutu.

Gerakan perubahan yang dilakukan Abe tidak hanya menimbulkan krititik dari luar negara, tetapi juga semakin bertumbuh krititik dari dalam negeri. Rating persetujuan menurun. Generasi baru demonstran anti-perang Jepang menentang Abe. Para pengunjuk rasa, termasuk pemenang Hadiah Nobel, musisi populer dan tokoh-tokoh lainnya, takut perubahan fundamental bisa mengubah karakter Jepang sebagai bangsa cinta damai.¹²²

Langkah bersejarah dalam militer Jepang, pada bulan September 2015 Parlemen Jepang telah memutuskan untuk mengizinkan militernya melangkah keluar negeri untuk pertama kalinya sejak akhir perang dunia dua 70 tahun yang lalu. Anggaran belanja militer Jepang yang diajukan Abe telah disetujui oleh mejelis rendah yang didominasi pemerintah. Koalisi pemerintah memegang mayoritas suara dari oposisi yaitu 148 banding 90 melawan. Japan Times

¹²¹ *Ibid*

¹²² *Ibid*

melaporkan dibutuhkan 200 jam lebih untuk membahas undang-undang tersebut, ambisi yang telah lama dipegang oleh Shinzo Abe.¹²³

Pemerintahan Abe telah mendorong undang-undang keamanan yang akan memungkinkan militer Jepang untuk memobilisasi ke luar negeri ketika ketiga kondisi terpenuhi. Pertama, ketika Jepang diserang, atau ketika sekutu dekat diserang, dan mengancam kelangsungan hidup Jepang serta menimbulkan bahaya jelas bahaya orang-orang. Kedua, ketika tidak ada lagi cara lain yang tepat untuk mengusir serangan dan menjamin kelangsungan hidup di Jepang dan melindungi rakyatnya. Ketiga, penggunaan kekuatan dibatasi oleh hal-hal minimum yang dibutuhkan.¹²⁴

Beberapa tindakan militer yang akan diperbolehkan oleh hukum adalah seperti.¹²⁵

- Jepang akan memberikan dukungan logistik ke Korea Selatan jika menyerang Utara, meskipun Abe mengatakan hal ini masih akan bertentangan dengan Konstitusi untuk mengirim pasukan Jepang melawan tanah Korea.
- Undang-undang ini akan melegalkan Jepang untuk menembak jatuh rudal Korea Utara menuju Amerika Serikat. Saat ini yang dilakukan Korea Utara adalah mengancam Jepang agar dapat menembak jatuh rudal mereka. Rudal Korea Utara sejak beberapa

¹²³ “Japan to Allow Military Role Overseas In Historic Move”, *BBC News*. Diakses di <http://www.bbc.com/news/world-asia-34287362> pada 21 Oktober 2015.

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid*

tahun lalu telah dianggap mampu menghantam rata daratan Amerika Serikat.

- Aksi militer untuk menjaga jalur pengiriman, seperti penyapuan ranjau, bahkan jika di zona konflik aktif, mungkin akan diizinkan jika ancaman ketika pengiriman cukup parah dan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup di Jepang. Wakil Ketua Abe dari Liberal Demokrat (LDP), Masahiko Komura, mengatakan bahwa masalah-masalah yang relatif kecil seperti peningkatan harga minyak tidak akan cukup, harus ada merupakan bahaya yang jelas kepada orang-orang di Jepang.
- Keterlibatan bersenjata dalam penyelamatan sandera juga akan menjadi mungkin. Di Januari 2013, 10 sandera Jepang tewas di Amenas pabrik gas di Aljazair.
- Batas-batas daerah pada dukungan militer Jepang untuk Amerika Serikat dan angkatan bersenjata asing lain juga akan dihilangkan.
- Pemerintah mengatakan bahwa perubahan dalam kebijakan pertahanan penting untuk memenuhi tantangan militer baru seperti peningkatan yang dilakukan Tiongkok

Di dalam *National Defense Program Guidelines* (NDPG) ataupun *Annual White Paper Defense of Japan* dapat dicermati bahwa kebijakan-kebijakan pertahanan Jepang semakin responsive dan semakin berani menanggapi negara-negara serta konflik yang dianggap merupakan ancaman bagi Jepang. Dan Jepang dengan jelas menggaris bawahi Jepang akan terus meningkatkan kapabilitas

militernya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keamanan dunia khususnya kawasan, dan sebagai pertahanan dari ancaman-ancaman militer nyata yang semakin meruncing.

Kebijakan-kebijakan ini merupakan realisasi dari ambisi Abe untuk membawa Jepang menjadi negara yang mandiri dari segi pertahanan dan mampu menjaga kedaulatan negaranya sendiri.

B. Kapabilitas Militer Penunjang Sektor Ekonomi Jepang

Negara Jepang diakui sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar di kawasan maupun di kancah internasional. Namun, kondisi ekonomi yang tergolong kuat ini mempunyai perilaku yang cukup berbeda dengan negara ekonomi maju lainnya terutama perihal kebijakan keamanan dan militer.

Dalam bukunya, Rohwer memproyeksikan akan masa depan Asia yang akan menjadi wilayah bernaungnya para major player dalam bidang ekonomi maupun militer. Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang paling maju ekonominya serta para pemegang kekuatan militer besar yang memegang peran penting dalam konteks keamanan di Asia Pasifik. Di antara kawasan-kawasan di Asia, Asia Timur adalah kawasan yang paling maju secara ekonomi dan merupakan tempat bernaungnya para negara major player dengan kekuatan militer besar yang memegang peranan penting dalam konteks keamanan di Asia Pasifik. Para major player tersebut diantaranya adalah China, Korea Selatan, Jepang, Korea Utara dan tak luput Amerika dan Rusia yang walaupun secara geografis

tidak terletak di Asia Timur, namun eksistensinya sangat terasa di kawasan ini. Pertumbuhan industri (termasuk industri pertahanan) dan peningkatan kapabilitas militer berkembang secara pesat di Asia Timur. Bahkan, menurut beberapa ahli, Asia Timur saat ini adalah salah satu wilayah dengan pengeluaran biaya militer terbesar di dunia.¹²⁶

Keadaan pasal 9 sampai saat ini masih menjadi pembatas bagi Jepang dalam melakukan ekspansi militernya walaupun secara kondisi ekonomi negara sangat mampu menunjang peningkatan serta ekspansi militer. Pada tahun 1976, Perdana Menteri terdahulu Miki Takeo mengumumkan pembelanjaan pertahanan harus dijaga dibawah 1% dari produk domestik bruto (PDB) Jepang. Batas yang terus diamati hingga 1986. Pada tahun 2005, anggaran militer Jepang dijaga di sekitar 3% anggaran nasional; sekitar setengahnya dihabiskan untuk biaya personil, dan sisanya untuk program pengembangan senjata, pemeliharaan dan biaya operasional. Pada tahun 2014, Jepang berada di 10 besar daftar anggaran pertahanan terbesar di dunia berdasarkan pengeluaran, dengan pengeluaran sekitar 1% dari PDB.¹²⁷

Pada tahun 2016 negara Jepang menduduki peringkat 10 besar negara dengan pembiayaan militer yang menduduki peringkat ke 8 hanya dengan 2,7% ekspenditur militer. Dan terbesar kedua di Asia setelah Cina yang menduduki peringkat kedua dengan total ekspenditur 13%.

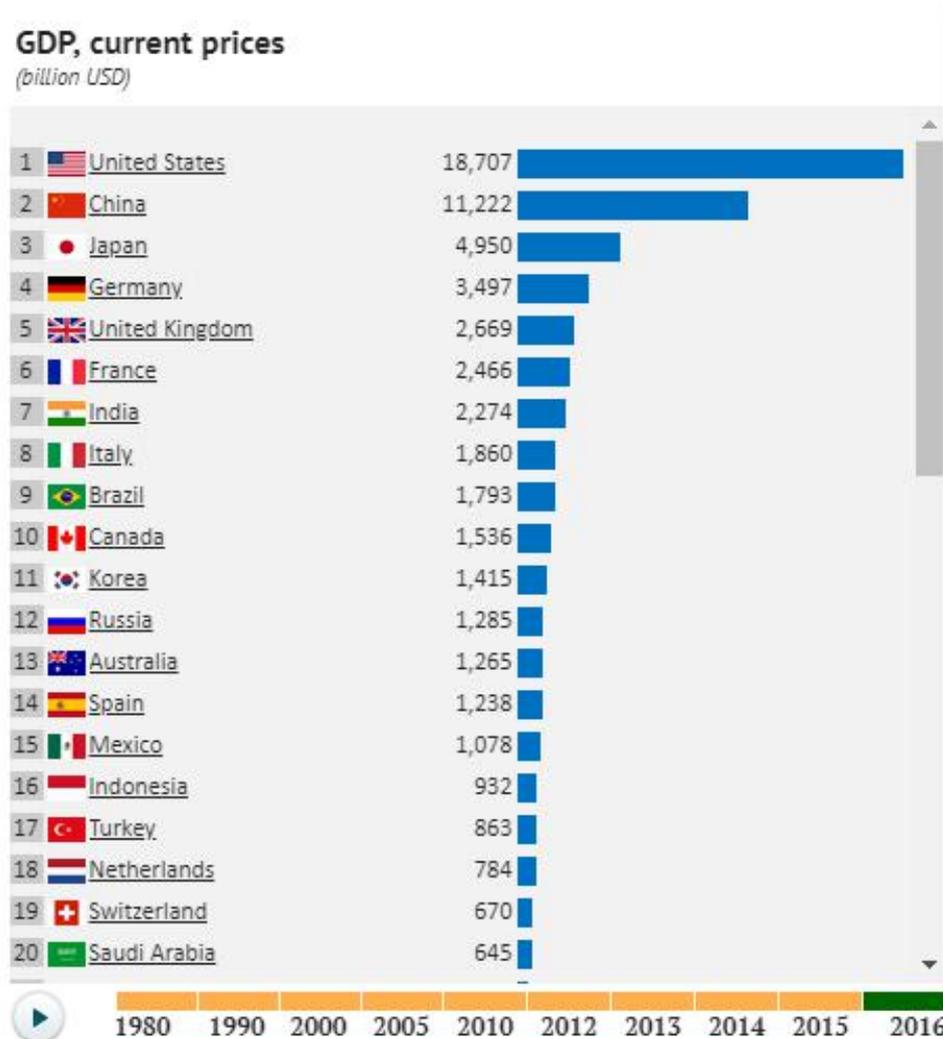
¹²⁶ Arron Friedberg, "Ripe for Rivalry: Prospect for Peace in a Multipolar Asia", *International Security*, Vol. 18 No. 3, Winter 1993, h. 9.

¹²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_Bela_Diri_Jepang

Pembelanjaan militer tersebut hanya 2,7% yg digunakan dari anggaran belanja militer negara yang diajukan sebesar 5,2%. Meskipun persentase yang kecil namun pada tahun 2016 nominal yang terealisasi cukup besar mengingat pada tahun tersebut Jepang menempati posisi ketiga GDP terbesar di dunia.

Gambar 4.1

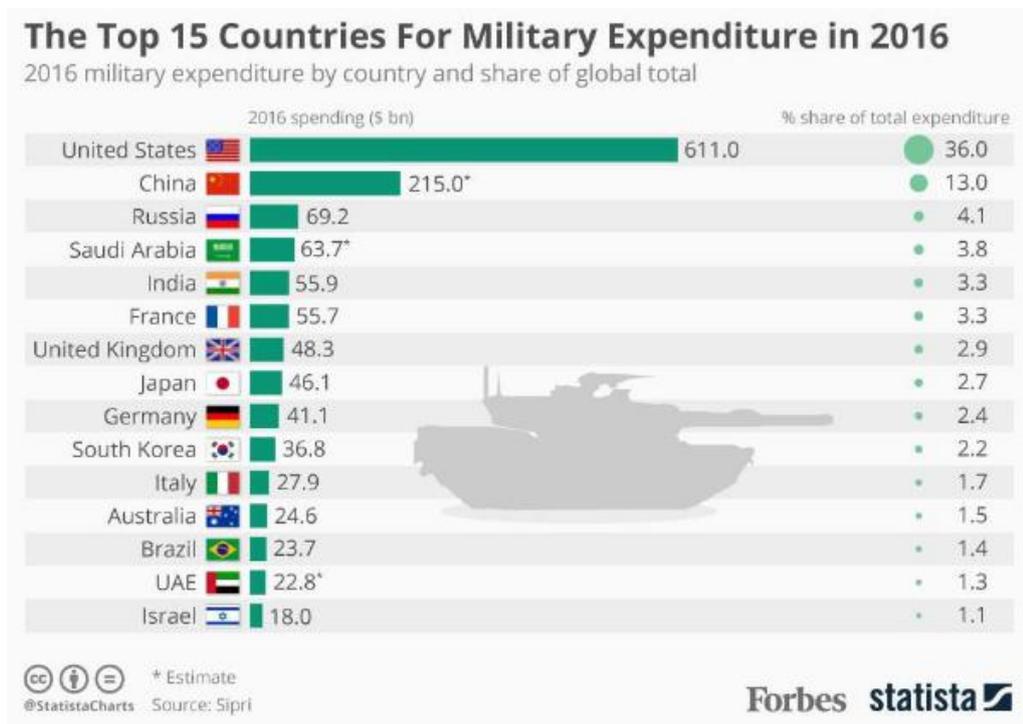
Peringkat GDP Terbesar di Dunia 2016



Sumber : <https://knoema.com/tlcnrcg/gdp-by-country-world-largest-economies-2016>

Gambar 4.2

Top Military Expenditure in 2016



Sumber : Sipiri

Dalam upaya meningkat ekonomi dan militernya Jepang memfokuskan perhatiannya pada dua negara yaitu Cina dan Rusia. Negara-negara ini sedang bersaing secara kompetitif dalam membangun kekuatan militernya dengan memperebutkan sumber daya dan kompetisi terbuka dalam bidang ekonomi. Cina saat ini menjadi negara yang sangat berpengaruh baik secara politik, ekonomi dan militer. Komunitas internasional telah mengakui keberadaan Cina sebagai pemain utama di kawasan dengan partisipasi aktif nya dalam sektor keamanan non

tradisional. Namun hal yang menjadi kekhawatiran negara sekitarnya adalah peningkatan kemampuan militer dan modernisasi alutsista dalam tempo yang sangat cepat dan meluas, didukung dengan tingginya dan peningkatan anggaran belanja pertahanan secara konstan, kondisi ini berjalan tanpa adanya kejelasan status dan visi militer yang dituju dari modernisasi militer Cina.

Jepang ingin meredam kebangkitan Cina yang ditandai oleh kebangkitan militer dan pengaruh perekonomiannya di Asia Tenggara. Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari perjanjian pasifis yang disebut Pasal 9. Shinzo Abe sebagai pemimpin Liberal Democratic Party berupaya melakukan kampanye di kalangan politik dan masyarakat Jepang bahwa Jepang perlu membangun kekuatan pertahanan yang memadai untuk menghadapi perubahan kondisi keamanan di Kawasan. Upaya tersebut membuahkan hasil dan pada tanggal 1 Juli 2014 Kabinet Jepang meratifikasi re-interpretasi Pasal 9.

Pada 2014, Abe mencabut larangan ekspor senjata. Setahun berikutnya, setelah mengadopsi interpretasi baru terhadap pasal 9 sehingga memungkinkan Jepang untuk melakukan misi global bersama AS. Fasilitas-fasilitas militer baru pun mulai dibangun di Okinawa, Guam, kepulauan Mariana, dan kepulauan di barat daya Jepang yang berbatasan dengan Taiwan.

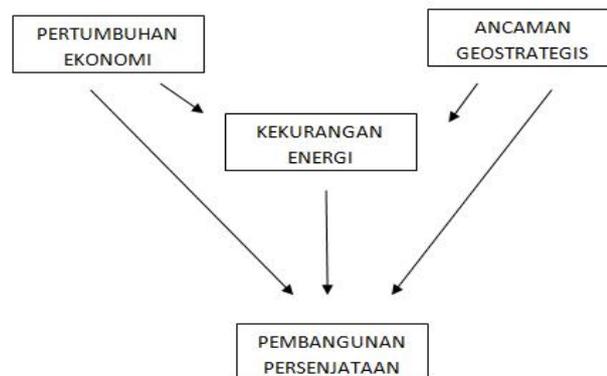
Bagi negara kawasan Asia kuat secara ekonomi saja bukanlah hal yang cukup, isu ekonomi merupakan isu global yang menempati posisi krusial bagi sisi ekonomi politik internasional maupun kemanan internasional. Wilayah ini mempunyai hasrat lebih dalam hal keamanan ekonomi maaupun kemanan

pertahanan dan militer. Selain karena tingkat kecurigaan yang tinggi antar negara, kebutuhan pertahanan dan kemanan di kawasan ini merupakan penunjang utama dalam berlangsungnya perekonomian antar negara. Permasalahan energi dan sumber daya alam yang kerap terjadi antar negara merupakan ancaman krusial kemanan energi bagi kawasan ini serta negara-negara di dunia.

Faktor yang mempengaruhi serta mengandung implikasi bagi kemanan ekonomi dan kemanan internasional terutama bagi Jepang merupakan kebutuhan yang berasal dari pertumbuhan dan kemakmuran yang pesat. Kunci hubungan ini secara ringkas dilukiskan melalui diagram empat bidang (*quadrangle*).

Bagan 4.1¹²⁸

Pertumbuhan ekonomi, energi, ancaman, geostrategis, dan persenjataan.



Pada tahun 1970-an terjadi perubahan posisi ekonomi Jepang dan AS. Jepang sudah berkembang menjadi *super power* ekonomi dengan GNP yang mulai menggeser kedudukan AS. Teknologi Jepang berhasil menyaingi kemampuan AS, dan di tahun 1985 Jepang sudah merupakan negara kreditor

¹²⁸ Kent E. Calder, *Op. Cit.* Hal. 7.

terbesar di dunia sementara AS telah menjadi negara penghutang terbesar di dunia. Akan tetapi strategi nasional yang dijalankan Jepang pasca kekalahannya dalam PD II sampai masa perang dingin menghasilkan suatu kondisi bahwa Jepang adalah “Raksasa Ekonomi yang tidak memiliki kekuasaan politik”.¹²⁹

Kasus yang menggambarkan seperti bagan diatas dalam kasus Jepang adalah ketika sepanjang seribu lima ratus mil kepulauan Jepang tidak ada dan belum ada satu ladang minyakpun yang dikembangkan, 99% dari total pasokan minyak merupakan hasil impor, yang sebagian besar berasal dari Teluk Persia. Dan negara-negara Asia Timur Laut lainnya, yaitu Taiwan, propinsi-propinsi maritim Rusia, Korea Utara dan Korea Selatan, serta Tiongkok sama-sama berada dalam kesulitan, ketika ladang minyak kering. Bahkan ladang-ladang minyak yang berlimpah di Sumatera Utara, Indonesia, juga mendorong provokasi Jepang karena keinginannya untuk mendapatkan minyak bumi. Perebutan minyak ini merupakan perebutan yang krusial bagi negara-negara di dunia sehingga menyebabkan perang Dunia II.

Konsumsi energi minyak akan terus meningkat karena adanya peningkatan proses industrialisasi baik untuk segi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan industri militer. Kegiatan industrialisasi ini tidak hanya berlangsung di negara-negara maju seperti Eropa dan AS, negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Utara, serta Taiwan telah dikenal dunia sebagai negara industri baru atau macan Asia pada akhir decade 20-an yang membutuhkan dan menggunakan energi minyak dalam jumlah yang cukup besar

¹²⁹ “The Military Balance”, *Loc. Cit.*

dalam rangka menunjang berlangsungnya industri dibidang ekonomi maupun industri militer.¹³⁰

Konsumsi energi di Asia tidak terbatas pada minyak bumi. Seiring pertumbuhan ekonomi yang mencuat, kawasan ini sangat banyak mengkonsumsi sejumlah besar batubara dan gas alam. Tetapi persediaan bahan bakar tersebut sangatlah terbatas. Akibat yang tidak terelakkan adalah krisis energi di sebuah kawasan yang adalah lebih dari seperempat perekonomian global, dan pangsa kebutuhan energinya jauh lebih besar. Kekurangan energi di Asia mendorong tumbuhnya ketegangan-ketegangan keamanan dalam bentuk lain. Pada tahun 2010, lusinan super tanker setiap bulan akan berangkat dari sumur-sumur minyak Arab Saudi, seperti dari Kaspia, dari Ras Tanurah menuju Pusan, Yokohama, dan Shanghai. Lebih dari lima belas juta barel (hampir 20% konsumsi dunia) mengalir dari Teluk Timur Tengah ke kawasan Timur Jauh.¹³¹

Tabel 4.1

Konsumsi Minyak Dunia Berdasarkan Wilayah

1990-2005 dan Proyeksi Tahun 2006-2020 (dalam juta barel per hari)

Wilayah dan Negara	Masa Sekarang				Proyeksi		
	1990	1996	2000	2005	2010	2015	2020
Negara Industri Maju	39	42,7	44,9	47,4	50,1	52,3	54,3
Amerika Serikat	17	18,3	19,5	19,5	22,7	23,7	24,7
Eropa Barat	12,5	13,7	14,4	14,4	15,3	15,6	16,0

¹³⁰ Nurani Chandrawati, "Krisis Energi dan Keamanan Pasokan Energi", *Analisis CSIS: Indonesia dan Isu-Isu Global*, Vol. 36 No.1 Maret 2007, Hal. 75

¹³¹ *Ibid*

Tiongkok	2,3	3,5	4,5	5,0	6,4	8,1	8,5
Jepang	5,1	5,9	5,6	5,7	6,0	6,3	6,6
Total Kebutuhan Dunia	66	71,5	77,1	84,8	93,5	101,8	110,1

Sumber: Nurani Chandrawati, "Krisis Energi dan Kemanan Pasokan Energi", *Analisis CSIS: Indonesia dan Isu-Isu Global*, Vol.36 No.1, Maret 2007, Hal.75

Jepang harus bersaing dengan negara-negara maju di seluruh dunia terutama negara tetangganya Tiongkok untuk dapat terus mensuplai kebutuhan konsumsi energi yang dirasa ketersediaanya sudah mulai menipis pada abad ke-21, guna kebutuhan industri ekonomi maupun industri pertahanan dan militernya. Jepang harus terus menerus melakukan proses peningkatan kekuatan pertahanan dan militernya melalui inovasi di bidang teknologi militer guna memenuhi perkembangan strategi kemanan yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kondisi kemanan pasca Perang Dingin.¹³²

Pertumbuhan Asia menunjukkan kekuatan ekonomi Asia, kawasan ini semakin menentukan harga-harga di Amerika Serikat dan bahkan di seluruh dunia. Pasar energi, pangan, dan kapital milik AS semuanya bergantung pada pertumbuhan Asia. Harga dan saham berfluktuasi dengan berubahnya nilai yen. Dan keberadaan Jepang dan Tiongkok untuk saat ini sudah memegang dua pertiga devisa seluruh dunia.

Pergeseran ekonomi ke kawasan Asia tersebut melemahkan keterlibatan Amerika Serikat dalam menjamin stabilitas keamanan politik dan perebutan energi di Asia. Bayang-bayang regionalisme yang semakin mendalam pada

¹³² *Ibid.*, Hal. 77.

perekonomian dunia, menarik Amerika terjun untuk mengawasi kawasan yang sangat kaya ini, apalagi ketika minat perekonomian Asia berbalik ke arah negara mereka sendiri. Namun Asia masih labil dan mudah bergolak dengan preihal masalah ideologi, antagonisme nasionalis, kebutuhan energi, perebutan sumber daya alam, dan sisa perpolitikan pasca perang dingin, dapat memicu kompetisi persenjataan yang mudah meletus terdorong oleh pertumbuhan ekonomi. Hal-hal tersebut akan membuat kawasan ini labil dan berbahaya serta akan dengan mudah menciptakan isu pertahanan dan kemanan di Pasifik khususnya Asia menjadi perhatian seluruh dunia.¹³³

Asia sekarang menimbulkan bayangan yang makin lama makin besar bagi dunia. Perekonomian Asia menguasai sepertiga pasar global dan 41% cadangan bank seluruh dunia. Tetapi dengan penduduk sejumlah setengah dari penduduk dunia, cadangan ekonomi yang besar, perkembangan teknologi yang selalu lebih canggih, serta pertumbuhan yang eksplosif yang hampir selalu mencapai dua digit di seluruh negara, kawasan Asia akan menjadi pangsa pasar yang lebih besar bagi perekonomian global.

Faktor yang paling utama dilihat dari segi kepentingan Jepang terhadap stabilitas dan keamanan di wilayah ASEAN, adalah ketergantungan Jepang terhadap jalur laut yang dilintasi oleh kapal-kapal Jepang di Selat Malaka dan di wilayah perairan Indonesia. Wilayah ASEAN menjadi sangat strategis ditinjau dari kepentingan pihak Jepang tersebut, sengketa kawasan yang diperebutkan oleh beberapa negara, termasuk Tiongkok, juga dianggap sebagai *flashpoint* yang

¹³³ Kent E Calder. *Op. Cit.* Hal.15-16.

dikhawatirkan Jepang. Hal ini mengundang anggapan bahwa dari sisi kepentingan Jepang dan keterlibatan ekonomi Jepang di kawasan ASEAN terutama dibidang perdagangan dan investasi lebih banyak perhitungan untung rugi daripada pemikiran strategis.¹³⁴

Kawasan Laut Tiongkok Selatan juga merupakan jalur strategis karena lebih dari empat puluh ribu kapal melewati jalur tersebut setiap tahunnya. Disamping itu kawasan ini merupakan jalur utama kapal-kapal minyak dari Timur Tengah yang mensuplai kebutuhan minyak Jepang. Sebaliknya, Jepang juga membutuhkan keamanan kawasan tersebut karena mensuplai jalur utama bagi kapal-kapalnya yang menyangkut barang-barang produksi menuju Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Ekonomi Jepang yang tergantung pada penjualan barang elektronik, mesin dan otomotif jelas membutuhkan stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Demikian pula Amerika yang membutuhkan stabilitas jalur laut bagi kelancaran kapal-kapal perangnya di kawasan tersebut.¹³⁵

Jalur laut di kawasan tersebut secara ekonomi sangat penting bagi negara-negara Asia Tenggara, terutama negara-negara ASEAN mengingat semakin meningkatnya hubungan dagang negara-negara ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (Hongkong) dan Taiwan. Ketidak amanan wilayah itu akan mempengaruhi angkutan laut baik yang datang dari negara-negara tersebut di atas ke negara-negara ASEAN ataupun sebaliknya.¹³⁶

¹³⁴ Abdul Irsan, *Op. Cit.* Hal. 116.

¹³⁵ Dr. Bambang Cipto, MA. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2007. Hal.204-205

¹³⁶ Soedjati Djiwandono, "Berbagai Dimensi Konflik", Jakarta, CSIS, 1988. Hal.315-318

C. Faktor Konteks Internasional

Kebijakan Jepang dalam meningkatkan kapabilitas militernya tidak dapat terelakan dari faktor eksternal yaitu faktor konteks internasional yang mendorong Jepang mentransformasikan sistem pertahanan dan kemanannya. Meningkatnya suhu politik di Asia Timur, khususnya Asia Timur Laut (*Northeast Asia*) sangat mengawatirkan pihak Jepang yang akan merasa sangat terancam kedaulatannya jika tidak memiliki kemampuan sistem pertahanan yang mandiri.

Faktor tersebut datang dari negara tetangga Tiongkok dan Korea Utara, serta persetujuan AS yang mendukung Jepang mentransformasikan sistem pertahanan dan keamanannya menjadi sistem pertahanan dan keamanan negara normal pada umumnya (normalisasi). Dari sisi Tiongkok yang mengalami perkembangan sangat cepat secara ekonomi serta ekonomi ini juga diproyeksikan untuk membiayai modernisasi pertahanan dan militernya yang meningkat pesat. Posisi Jepang yang merasa terancam karena terhimpit dua negara komunis yang memiliki relasi kuat terlebih dalam hal peningkatan kapabilitas militernya yaitu Tiongkok dan Korea Utara, memicu Jepang sebagai negara berdaulat untuk mempertahankan negaranya dari *security dilemma* antara Jepang, Tiongkok, dan Korea Utara.

Kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara di Kawasan Asia Timur tidak hanya akan mengancam pengaruh Jepang di kawasan, tetapi hal tersebut juga menjadi ancaman yang nyata bagi hegemoni Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur. Meningkatnya militer Tiongkok akan membuka peluang bagi negara tersebut untuk dapat menyebarkan pengaruhnya tidak hanya dalam sektor militer

tetapi juga pada sektor lain seperti ekonomi. Dengan aliansi Jepang dan AS sampai saat ini AS dapat mengandalkan Jepang untuk menghambat dan mengimbangi pengaruh Tiongkok di negara kawasan, AS mulai menekan Jepang untuk menjadi negara normal (normalisasi) dari sisi pertahanannya guna untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan terutama Asia Timur. Dengan menormalisasi sektor pertahanan Jepang, diharapkan negara ini dapat lebih memaksimalkan kapabilitas militernya baik di dalam ataupun di luar negeri.

C.1. *Security Dilema* Jepang atas Tiongkok dan Korea Utara

1. Meningkatnya Kapabilitas dan Potensi Konflik Militer Tiongkok

Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang mencapai 1,36 miliar jiwa pada tahun 2015 angka tersebut merupakan 18,8% dari keseluruhan jumlah penduduk dunia, dan memiliki luas 9.600.000 km² ang terdiri dari 22 provinsi, lima wilayah otonomi, dan tiga kota besar yaitu Beijing, Shanghai, dan Guang Zhou.

Perjalanan militer Tiongkok bukanlah suatu hal yang baru untuk negara ini, dibuktikan dengan kemenangan militer Tiongkok di beberapa perang penting seperti perang melawan penjajahan Jepang tahun 1937-1945, perang Revolusi Agraria tahun 1927-1937, dan beberapa perang lainnya, sejarah panjang ini berlangsung di bawah kepemimpinan Partai Komunis.¹³⁷

¹³⁷ Simela Victor Muhammad, "Pengembangan Kekuatan Militer Cina dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia Timur" P3DI, Vol.14. No.3, 2009, diakses di http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14309407436_0853-9316.pdf pada 18 Januari 2016

Sejak awal tahun 1990 atau pasca Perang Dingin, militer Tiongkok berusaha mengembangkan penelitian dan inovasi berbasis teknologi mutakhir dan mencapai kekuatan militer yang komprehensif di abad-21. Kapabilitas militer Tiongkok berjalan lurus dengan peningkatan kekuatan ekonomi negara tersebut, Tiongkok menggunakan kemampuan ekonominya untuk menopang peningkatan kapabilitas militernya. Seluruh Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Daratnya dibangun dengan anggaran yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Tujuan Tiongkok meningkatkan kapabilitas militernya juga terkait dengan letak geografisnya yang berada di sepanjang Laut Kuning, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Tiongkok Timur.¹³⁸

Pemerintah Tiongkok menyatakan kenaikan anggaran pertahanan yang dicanangkan dengan nominal cukup besar ini dimaksudkan untuk berbagai pembiayaan sektor pertahanan dan militernya, yaitu pembiayaan personil dan sistem pengamanan sosial, reformasi struktural lembaga pertahanan, kerjasama pertahanan dan kemanan serta untuk aksi internasional.

Anggaran pertahanan Tiongkok mengalami peningkatan nominal yang cukup pesat setiap tahunnya, dipantau selama 15 tahun terakhir dari tahun 2000, anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah Tiongkok adalah 14,6 miliar dolar, tahun 2001, 17 miliar dolar lebih besar dibandingkan Korea Selatan dan Taiwan. Kenaikan anggaran pertahanan

¹³⁸ Richard D.,Fisher Jr., *China's Military Modernization: Building for Regional and Global Reach*, Westport: Praeger Security International, 2008, Hal. 80

Tiongkok pada tahun 2001 dikarenakan konflik yang terjadi di Kosovo dan situasi dunia saat itu. Tahun 2002, anggaran yang dialokasikan sejumlah 20 miliar dollar dan tahun 2003 naik menjadi 22 miliar dollar. Di tahun 2004 anggaran pertahanan Tiongkok naik terus meningkat sebesar 2,6 miliar dollar menjadi 24,6 miliar dollar, meskipun pada tahun 2004 Tiongkok mengalami defisit sebesar 38,7 miliar dollar akibat dari pengeluaran persenjataan yang melebihi anggaran yang telah ditentukan. Tahun 2005 anggaran pertahanan Tiongkok naik sebesar 12 persen atau sekitar 29,9 miliar dollar dan tahun 2006 naik sebesar 15 persen atau sekitar 35 miliar dollar. Tahun 2007 meningkat menjadi 45 miliar dollar dan Maret 2008 pemerintah Tiongkok secara resmi mengumumkan kenaikan anggaran pertahanannya menjadi 57,22 miliar dollar.¹³⁹

Peningkatan anggaran belanja militer Tiongkok pada tahun 2015 dibuktikan dengan posisi Tiongkok yang menempati peringkat kedua setelah Amerika Serikat dalam pembelanjaan perangkat militer di tahun 2015 yang mencapai 13% dari seluruh persentase belanja militer dunia di bawah Amerika Serikat 36%. Peningkatan anggaran militer Tiongkok setiap tahunnya menunjukkan sebuah indikasi bahwa Tiongkok sedang berusaha untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Timur, bahkan untuk bersaing dengan negara-negara Barat seperti Amerika dan Rusia.

Selama Perang dingin berlangsung, Tiongkok hanya berfokus pada bagaimana keamanan nasionalnya dapat bertahan di antara persaingan dua

¹³⁹ "China's Defense Budget" diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/China/budget.htm> pada 18 Januari 2016

kekuatan hegemoni. Bagaimana Tiongkok dapat melawan salah satunya dari kekuatan besar tersebut atau bahkan kedua-duanya sekaligus bersama dengan sekutunya. Sudut pandang pemerintah Tiongkok, “Kekuatan militer adalah penopang yang paling penting dalam misi mempertahankan kedaulatan wilayah dan integritas sebuah negara, melawan agresi dari bangsa asing dan menjaga keutuhan negara.” Sehingga, Tiongkok merasa pentingnya mengembangkan kapabilitas militer yang kuat untuk mencapai misi di atas.¹⁴⁰

Pada masa pemerintahan Deng Xiaoping sampai tahun 2010, adalah era menuju kemungkinan perluasan pengaruh militer, seperti di selat Taiwan dan Selat Korea, sekaligus memperkuat kontrol di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, banyaknya potensi konflik yang akan terjadi di Kawasan Asia Timur terutama beberapa permasalahan sengketa wilayah di sejumlah perbatasan, seperti yang terjadi antara Tiongkok dan Vietnam atas Pulau Paracel yang masuk dalam wilayah kepulauan Sparty, di laut Cina Selatan dan Sengketa dengan Jepang atas wilayah atau Pulau Senkaku, menjadi salah satu bukti mengharuskan Tiongkok untuk memperkuat system pertahanannya. Belum lagi, persaingan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan yang merupakan negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan memiliki pengaruh dalam dunia internasional, sehingga persaingan yang terjadi antara tiga negara

¹⁴⁰ Jurnal Rezki Satris, “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer Cina sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik” *The POLITICS*; Universitas Hasanudin, Vol. 1, No. 1, Januari 2015. Hal 99. Dalam Tesis Sebastinus Airlangga, *Pengaruh Kebijakan Keamanan Baru Cina Dan Respons Asean*. Universitas Pertahanan Indonesia.

utama dalam kawasan ini, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok sangat kompetitif di dunia internasional.¹⁴¹

Bagi Tiongkok munculnya Jepang juga sebagai salah satu negara yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa di Asia Pasifik menjadi salah satu ketakutan tersendiri bagi Tiongkok. Jepang dalam sejarahnya, muncul sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Timur dan sejarah masa lalu imperialisme Jepang. Tiongkok tidak ingin melihat Jepang tumbuh sebagai kekuatan utama dalam kawasan Asia Timur termasuk memiliki kekuatan militer yang kuat. Bagi Tiongkok, Jepang harus tetap berada posisi sub-ordinat dan Tiongkok akan terus membandung segala macam pergerakan Jepang untuk menjadi kekuatan utama di kawasan Asia Timur. *China will expect Japan to accept a subordinate role.*¹⁴²

Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang menaruh *concern* terhadap atas pengembangan kekuatan militer Tiongkok yang dianggap sebagai “musuh besar” di kawasan selain Korea Utara.¹⁴³ Melihat pengembangan kekuatan militer Tiongkok yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan mendorong Jepang mau tidak mau menaikkan anggaran pertahanan dan keamanannya sebagai efek dari *security dilemma*.

¹⁴¹ Adi Joko Purwanto, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasi terhadap keamanan di Asia Timur” *SPEKTRUM*; Universitas Wahid Hasyim, Vol. 7, No. 1, Juni 2010. Hal. 2-7

¹⁴² K. Hamani Andrew, “Japan and Military Balance of Power in Northeast Asia”. dalam, Judith F. Korenberg and John R. Faust. *China in World Politics; Policies, Processes, Prospects.*, Lynne Rienner. 2005. Hal.. 200

¹⁴³ “Pengembangan Kekuatan Militer Cina dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia Timur”, *Loc. Cit.*

Anggaran belanja pertahanan Jepang pertama kali mengalami kenaikan pada tahun 2000 sebesar 4.935 milyar yen dimana meningkat sebesar 0,3% dari anggaran belanja tahun 1999 yang menunjukkan angka 4.920 milyar yen. Berkaitan dengan menguatnya mata uang yen tersebut, maka berdasarkan nilai nominal dalam dollar, peningkatannya dari US \$ 43,2 milyar menjadi US \$ 45,6 milyar. Penambahan jumlah personil dan biaya pemeliharaan secara meningkat sebesar 15 milyar yen dalam anggaran belanja. Ketentuan untuk penyediaan peralatan, menurun sebanyak 34,4 milyar yen dimana hal ini berkaitan dengan adanya pergeseran kebijakan dalam tubuh Badan Pertahanan Jepang (Japan's Defense Agency) yang lebih memfokuskan pada pengeluaran untuk pelatihan, kapabilitas intelijen dan kesiagaan.¹⁴⁴

Di bawah program kerjasama *Theater Missile Defense* (TMD) dengan Amerika Serikat, di dalam anggaran belanja termasuk sebanyak 2 milyar yen (US \$ 17 milyar) untuk membiayai penelitian pada suatu proyek.¹⁴⁵ Pada tahun 2007, Jepang meningkatkan anggaran pertahanan lebih tinggi 1,5 persen dari anggaran tahun 2006 naik menjadi 41,75 miliar dollar Amerika Serikat,¹⁴⁶ dan dari anggaran sebesar itu sebagian diperuntukkan oleh Jepang untuk pengadaan pertahanan rudal dan proyek pengembangan dan pembuatan kapal selam non nuklir generasi baru yang

¹⁴⁴ "Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer Cina sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik", *Op. Cit.*, Hal. 102

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ "Japan's Defense Budget". Diakses di <http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/budget.htm> pada 18 Januari 2016

lebih senyap dan lebih tahan menghadapi serangan serta memiliki kemampuan sonar yang lebih canggih.

Langkah Jepang meningkatkan anggaran militernya tersebut, meskipun hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari pertahanan nasional tetapi sesungguhnya dapat dipahami sebagai bagian dari respon Jepang terhadap pengembangan militer Tiongkok.

Peningkatan kapabilitas militer Tiongkok yang sangat pesat lebih mengarah kepada strategi ofensif walaupun Tiongkok menyebutnya “*active defense*”, kapabilitas militer Tiongkok ini lebih focus pada *fire power* yang dapat memberikan ancaman bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur, terutama Jepang. Jepang secara eksplisit mengatakan bahwa program militer Tiongkok dengan strategi ofensif itu merupakan ancaman utama bagi keamanan nasional Jepang. Hal ini membuat Jepang melakukan hal yang sama dengan mengembangkan kapabilitas militer. Namun kenyataannya peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Tiongkok lebih pesat dibanding peningkatan militer Jepang. Tiongkok memiliki senjata ofensif lebih banyak dibandingkan Jepang.¹⁴⁷

Reaksi Jepang dalam merespon meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok tidak hanya melalui langkah-langkah untuk mengimbangi secara kuantitas ataupun defensif saja, tetapi Jepang ingin mengembangkan kapabilitas militernya agar mampu mengimbangi teknologi maupun

¹⁴⁷ “Pengembangan Kekuatan Militer Cina dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia Timur”, *Loc. Cit.*

berdikari dalam mempertahankan kedaulatan negaranya sendiri, hal ini ditunjukkan dengan kebijakan Shinzo Abe yang merubah kebijakan pertahanannya menjadi pertahanan penuh baik pertahanan dalam ataupun luar negeri. Hal ini juga merupakan upaya Jepang dalam menormalisasi negaranya dalam hal pertahanan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Jepang dalam rangka mengimbangi kekuatan militer Tiongkok, menjadi salah satu bagian dari kekhawatiran Jepang atas dominasi Tiongkok. Sebagai sebuah konstelasi sosial dimana negara-negara hidup setara secara berdampingan tanpa ada otoritas yang lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut, rasa tidak aman yang muncul dari rasa saling curiga dan ketakutan akan mendorong negara-negara untuk berkompetisi dalam mendapatkan kekuatan yang lebih besar agar mereka merasa lebih aman.¹⁴⁸

Usaha Tiongkok dalam meningkatkan kemampuan militer dan meningkatnya aktivitas kelautan yang dilakukan di wilayah perairan Jepang dianggap sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan dan perdamaian keamanan bagi pemerintah Jepang. Aktivitas ini sudah terindikasi sejak 2002 yang menyebutkan bahwa *Marine Self Defense Forces* (MSDF) menemukan beberapa kapal perang Tiongkok berada di perairan Jepang. Modernisasi teknologi Tiongkok yang berkembang pesat, termasuk dalam mengembangkan kapal selam menyulitkan angkatan

¹⁴⁸Mochamad Raga, “Dinamika Persenjataan di Asia Timur antara Cina dan Jepang”, Tesis. Universitas Indonesia, 2011, Hal. 1-4

laut Jepang mendeteksi apakah terdapat kapal selam asing yang masuk ke perairan Jepang.

Pada tahun 2004 kapal selam nuklir Tiongkok memasuki kawasan Jepang dan memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk dapat hadir di pulau Senkaku (pulau yang masih diperebutkan antara Tiongkok dan Jepang sampai saat ini). Kejadian-kejadian tersebutlah yang dapat membawa Tiongkok dan Jepang dalam skenario terburuk yaitu perang terbuka.

Peristiwa ini dipicu konflik Kepulauan Senkaku yang masih dipersengketakan antara kedua belah pihak. Pulau ini diperebutkan karena di dalamnya menyimpan sumber gas dan minyak. Pada tanggal 8 september 2010, kapten kapal nelayan Zhan Qizhong ditahan setelah kapalnya bertabrakan dengan dua kapal patroli pengawas pantai Jepang di dekat Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang disengketakan. Kepulauan tersebut terletak di wilayah Okinawa, daerah selatan Jepang. Penangkapan tersebut dilakukan oleh kapal patroli Jepang, karena pihak Jepang menganggap kapal nelayan Tiongkok telah melanggar batas territorial negaranya. Namun pihak Tiongkok bersikeras bahwa apa yang dilakukan nelayan kapal ikan Tiongkok tidak menyalahi aturan batas territorial. Kedua negara meyakini bahwa penangkapan kapal nelayan Zhan terjadi di

perairan yang mereka klaim sebagai bagian dari kedaulatan negaranya masing-masing.¹⁴⁹

Menurut pihak Tiongkok dua kapal nelayannya hanya berada di dekat Perairan Senkaku, tidak memasuki batas teritorial perairan Jepang. Pihak Jepang mengklaim bahwa Tiongkok telah melanggar batas teritorial dan akhirnya mengambil tindakan menangkap kapal nelayan Tiongkok di Perairan yang di klaim kedua negara. Akhirnya Jepang menahan Zhan Qixiong dengan tuduhan melawan petugas pengawas pantai Jepang.

Kebijakan pertahanan dan keamanan pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe menunjukkan ambisi Abe untuk meningkatkan kekuatan militer Jepang. Di dalam Buku Putih pertahanan Jepang, memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan kekuatan militer Tiongkok dan bahkan secara jelas menyebut Tiongkok sebagai salah satu ancaman, termasuk terkait dengan sengketa kedua negara di Laut Cina Timur. Buku Putih tersebut melihat perkembangan kekuatan militer Tiongkok dan bagaimana Tiongkok meresponsnya.

Sekalipun menurut sebagian pengamat bahwa apa yang tertuang di dalam Buku Putih tersebut bukanlah hal yang mengejutkan lagi, akan tetapi hal ini menjadi sesuatu yang sangat mencolok dan menjadi perhatian banyak pihak. Jepang menunjukkan perhatian serius pada perkembangan militer Tiongkok dan aktivitas Tiongkok di Laut Cina

¹⁴⁹“Diplomatic tensions after Japanese arrest Chinese fisherman”, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/7989126/Diplomatic-tensions-after-Japanesearrest-Chinese-fisherman.html> pada 6 Januari 2016

Timur dan Selatan, pembentukan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di Laut Cina Timur dan insiden ‘pertemuan’ pesawat militer Tiongkok dan Jepang. Buku Putih pertahanan Jepang secara spesifik menyebutkan bahwa berbagai perkembangan di Tiongkok termasuk pembentukan ADIZ di Laut Cina Timur di sekitar wilayah yang disengketakan kedua negara, telah menyebabkan terganggunya hubungan diplomatik kedua negara.¹⁵⁰

2. Pengembangan Militer Korea Utara

Meningkatnya jumlah dan modernisasi rudal balistik di kawasan Asia-Pasifik merupakan tantangan keamanan bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, terutama Jepang. Pengamat percaya Korea Utara memiliki persenjataan *short-range ballistic missiles* (SRBMs). SRBMs yang dimiliki Korea Utara diyakini memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai target di Korea Selatan dan Jepang, termasuk beberapa pangkalan militer AS di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara juga telah melakukan beberapa tes dari sistem rudal balistik jarak jauh yang memuncak dalam peluncuran ruang sukses di Desember 2012.¹⁵¹

Tujuan utama dari program pengembangan senjata nuklir Korea Utara adalah untuk mengembangkan hulu ledak nuklir yang di “miniaturisasi” dalam miniature yang cukup kecil untuk menjadi balistik missile dengan jangkauan panjang. Dan dalam pengembangan nuklir dan

¹⁵⁰ Rizki Roza, “Buku Putih Pertahanan Jepang dan Pengaruhnya Terhadap Sengketa Laut Cina Timur”, P3DI, Agustus 2014, Vol. VI, No. 15. Hal 6-7. Diakses di http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-15-I-P3DI-Agustus-2014-75.pdf pada 06 Januari 2016

¹⁵¹ Ian E. Rinehart, Steven A. Hildreth dan Susan V. “Lawrence, Ballistic Missile Defense in the Asia-PASIFIC Region: Cooperation and Opposition” *Congressional Research Service*, 3 April 2015. Hal. 1. Diakses di www.crs.gov

missile tersebut membutuhkan test percobaan. Ancaman yang paling serius dalam pengembangan dan percobaan tersebut adalah ancaman terhadap negara lainnya yang termasuk ke dalam lingkup jangkauan dari Nodong missile, yang dapat mencapai seluruh Korea Peninsula dan beberapa *mainland* di Jepang.

Menurut Curtis Separrotti, pemimpin *U.S Forces Korea*, Korea Utara adalah salah satu dari negara yang memiliki persediaan senjata kimia terbesar di dunia.¹⁵² Korea Utara dengan terang menginginkan untuk memiliki gudang senjata kimia yang terbesar, termasuk gas beracun tanpa warna dan gas asrin. Dari beberapa sumber melaporkan estimasi depot penyimpanan senjata kimia Korea Utara kira-kira mempunyai 12 fasilitas bahan kimia mentah, prekursor¹⁵³, dan memproduksi atau menyimpan agen-agen senjata untuk senjata kimia. Estimasi Korea Utara memiliki produksi senjata kimia dengan kapabilitas mencapai 4.500 ton metric dalam beberapa tahun ini dan 12.000 ton selama periode krisis Korea Utara, dengan inventaris 2.500 sampai 5.000 ton, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan.¹⁵⁴ Dalam RAND analisis mengatakan “1 ton dari senjata kimia berbahan sarin apat menyebabkan sepuluh ribu kefatalan” dan jika Korea Utara memutuskan untuk menyerang salah satu dari negara tetangganya, Korea Selatan dan Utara akan menjadi “*the most*

¹⁵² “North Korea”, *NTI*, April 2015, <http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/>. Dalam, Ian E. Rinehart dan Mary Beth D. Nikitin, “North Korea: U.S Relations, Nuclear Diplomacy, and International Situation”, *Congressional Research Service*, 15 Januari 2016. Hal. 13

¹⁵³ Substansi yang terbentuk dari material lain, terutama dari reaksi metabolik

¹⁵⁴ “Ministry of National Defense, Republic of Korea”, *2010 Defense White Paper*, Desember 2010. Dalam Ian E. Rinehart dan Mary Beth D. Nikitin, *Loc. Cit.*

likely targets."¹⁵⁵ Korea Utara bukanlah negara pananda tangan *Chemical Weapons Convention (CWC)* yang melarang penggunaan dan penyediaan pasokan senjata kimia.

Jepang menilai bahwa pengembangan rudal balistik Korea Utara memasuki babak baru dengan peluncuran rudalnya pada 12 Desember 2012. Korea Utara meluncurkan rudal dari wilayah Tongh'ang-ri, yang terletak di wilayah pesisir barat laut, ke selatan. Tes peluncuran rudal balistik jarak jauh serta pengembangan berbagai kapabilitas militer Korea Utara terutama nuklirnya merupakan masalah serius yang dapat meningkatkan ancaman terhadap keamanan Jepang.

Korea Utara meluncurkan TD-2 pada saat itu, yang disebut "peluncuran satelit". Jepang menilai, berdasarkan pada teknologi yang diverifikasi melalui peluncuran kali ini dan di masa lalu, Korea Utara bisa mengembangkan rudal balistik jarak jauh dengan rentang lebih dari sekitar 10.000 km. Meskipun belum pernah jelas tentang beberapa teknologi yang terkait, Korea Utara telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam pengembangan rudalnya, yaitu dalam hal jarak.

Fakta bahwa Korea Utara telah mampu mempromosikan pengembangan rudal balistik dengan cepat tanpa melakukan begitu banyak peluncuran tes menunjukkan kemungkinan adanya transfer sumber daya yang terkait dan teknologi ke Korea Utara dari luar. Hal ini juga menunjukkan bahwa Korea Utara memajukan pembangunan rudal dengan

¹⁵⁵ Bennett, Bruce W. "N.K WMDs Carry Catastrophic Potential," *The RAND Blog*, November 19, 2014.

sumber daya keuangan dan mendapatkan keuntungan dengan mentransfer dan memperluas rudal balistik dan teknologi yang berhubungan dengan rudal. Korea Utara mengambil keuntungan dari data yang diperoleh melalui peluncuran uji yang dilakukan di negara-negara tujuan ekspor balistik rudal.

Selain itu, kemajuan jangka panjang pengembangan rudal balistik Korea Utara itu sendiri meskipun belum jelas tentang beberapa teknologi yang terkait, perhatian serius tidak hanya untuk keamanan kawasan Asia-Pasifik, tetapi hal ini juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan kemajuan pengembangan rudal balistik Korea Utara, ada peningkatan kekhawatiran transfer tambahan dan proliferasi balistik rudal atau teknologi terkait. Peluncuran kali ini menunjukkan bahwa masalah rudal balistik Korea Utara telah menjadi lebih realistis dan dekat dari perspektif peningkatan kemampuan dan mentransfer serta proliferasi teknologi yang relevan.

Jelas bahwa peluncuran adalah pelanggaran dari Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk UNSCR 1874, yang melarang Korea Utara menggunakan balistik di setiap peluncuran teknologi rudal. Untuk masalah itu, Jepang kan berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisis terkait informasi dan mengambil langkah-langkah memungkinkan untuk melindungi perdamaian dan keamanan Jepang, bekerja sama dengan

masyarakat internasional termasuk Amerika Serikat dan negara terkait lainnya.¹⁵⁶

Dalam *National Defense Program Guidelines* 2013, ditekankan bahwa perilaku Korea Utara secara khusus dalam hal pengembangan nuklir dan rudal yang berulang kali bertindak dan menyebabkan ketegangan regional dan hal tersebut merupakan bentuk dari mendestabilisasi keamanan wilayah Jepang dan masyarakat internasional. Serta perilaku provokatif yang merupakan ancaman serius untuk Jepang.

Untuk menanggapi serangan rudal balistik dan mengatasi perkembangan dan kemampuan rudal balistik Korea Utara, Jepang akan mengejar peningkatan komprehensif terkait kemampuan respon terhadap ancaman rudal balistik. Dalam hubungan aliansi Jepang-AS, Jepang akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pembagian misi antara Jepang-AS dalam hal keamanan regional, dan langkah-langkah tersebut merupakan sebuah penilaian sejauh mana kemampuan Jepang dalam merespon hal ini.¹⁵⁷

Pengembangan nuklir Korea Utara bagi Jepang merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan Jepang, terbukti Jepang mengambil tindakan yang responsive dengan mengimplementasikan *Special Radiological Survey* terkait tes nuklir Korea Utara mulai tanggal 9 September 2016 sampai waktu yang dibutuhkan. Program ini merupakan intruksi dari MOD dan hasil dari kesepakatan yang tercapai dalam *Liasion Meeting for Radical*

¹⁵⁶ "Report on North Korea's Missile Launch on December 12th, 2012", diakses http://www.mod.go.jp/e/d_act/bmd/report_20130125.html pada 02 Februari 2016

¹⁵⁷ "National Defense Program Guidelines" for FY 2014 and beyond (summary)

Countermeasure. Survey radiologi ini akan mengambil sample radioaktif dari debu dan gas mulia menggunakan T-4 *intermediate jet trainer aircraft*.¹⁵⁸

C. 2. Normalisasi Militer Jepang

Perubahan fundamental dalam orientasi kebijakan pertahanan Jepang, menimbulkan kontroversi di dunia internasional. Di satu sisi, perubahan ini adalah hak prerogratif Jepang dalam melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya, di sisi lain menimbulkan kecurigaan negara-negara tetangga, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Transformasi pertahanan merupakan hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat sepanjang decade terakhir ini. Hal tersebut diikuti pula oleh negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk di dalamnya Jepang para praktisi membuat beragam definisi mengenai transformasi. Donal Rumsfeld mendefinisikan transformasi sebagai *“a process that shapes the changing nature of military competition and copeation trough new combination of concepts, capabeliies, people, and organtations that exploit our nation’s advantages and protect against our assymeric vulnerablities to sustain our srateic position, which helps underpin peace and stability in the world”*¹⁵⁹

Sementara Douglas MacGregor mendefinisikan Transformasi pertahanan sebagai berikut:

¹⁵⁸“Implementation of a Special Radiological Survey in Relation to North Korea's Nuclear Test” Diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/pressrele/2016/160909a.html> pada 16 September 2016

¹⁵⁹ Edwin Seah, “Temporal Dominance Military Transformation and The Time Dimension of Strategy” *The Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS)*, Hal. 2. Maret 2006

*“Transformation involves reorganization and reform to reorient military institutions, policies, doctrine, and thinking to current strategic environment, as well as to the future. Most important, transformation means effectively combining and integrating service capabilities within new joint operational structures”*¹⁶⁰

Transformasi dominan distilahkan bagi perubahan yang signifikan dalam hal ini perubahan yang terjadi pada pertahanan suatu negara. Istilah “transformasi” dikenalkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Oleh karena itu banyak negara mengambil referensi transformasi pertahanan Amerika Serikat.

Secara garis besar dalam kurun hampir 20 tahun terakhir perkembangan pertahanan Jepang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 1997 sampai 2015, setidaknya telah mengubah wajah pertahanan Jepang menjadi lebih mandiri. Pasca tragedi WTC yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2001 lalu, banyak negara-negara di dunia melakukan pemeriksaan kembali terhadap fasilitas pertahanan keamanannya terhadap potensi ancaman dan serangan baik secara internal maupun eksternal.

Tragedi peristiwa 11 september 2001, yang menghancurkan gedung WTC merupakan babak baru dalam kebijakan keamanan global pada abad sekarang. Serangan yang dilakukan oleh *on-state acto* membawa dampak yang besar bagi beberapa negara dalam menetapkan

¹⁶⁰ *Ibid*, Hal. 4.

kebijakan pertahanan keamanannya dewasa ini. Tragedi tersebut membawa implikasi fundamental terhadap situasi dan percaturan politik internasional. Bagi Amerika Serikat sendiri, peristiwa tersebut merupakan pukulan telak bagi supremasi adidaya, yang menuntut respon dalam bentuk “perang terhadap terorisme”.

Hal itu juga berlaku bagi Jepang yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, dituntut turut mempercanggih dan memperkuat sistem pertahanannya apalagi didukung dengan situasi keamanan sekitar Jepang yang tidak terlalu kondusif, peningkatan potensi ancaman terhadap keamanan pertahanan tidak hanya mencakup terorisme global, tetapi juga meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, Selat Taiwan, uji coba senjata dengan hulu ledak nuklir serta peningkatan anggaran belanja pertahanan beberapa negara menimbulkan dampak saling curiga dan tidak mempercayai antar negara di kawasan tersebut. Begitu pula yang terjadi dengan Jepang dan negara-negara sekitarnya. Letak geografis Jepang yang berada di dalam kawasan sengketa tersebut secara tidak langsung akan menjadi salah satu faktor pendukung yang kuat bagi pemerintah Jepang untuk memperahankan kedaulatan dan keamanan teritorialnya.¹⁶¹

Pada Desember 2010 lalu, Tokyo telah mengumumkan haluan pertahanan baru sebagai respons atas meningkatnya anggaran militer Tiongkok dan manufernya di kawasan Asia Pasifik. Jepang mulai

¹⁶¹ “Japan’s New Security Strategy, Japan’s Visions for Future Security and Defense Capabilities”, *The Council Security and Defense Capabilities*, diakses dari [ww.mod.go.jp/e](http://www.mod.go.jp/e), Hal. 3.

memiliterisasi pertahanannya yang notabene masih terikat pada perjanjian persekutuan keamanan bersama antara Jepang dan Amerika Serikat. Sebagai konsekuensi dari haluan baru pertahanan Jepang untuk mengimbangi kekuatan militer Tiongkok, Jepang memutuskan untuk menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan nasional Jepang. Dan konsekuensinya, Jepang akan mempersilahkan kehadiran militer Amerika Serikat di Jepang.¹⁶²

Kebijakan pertahanan Jepang dirumuskan dengan tujuan menjamin perdamaian dan keamanan negaranya serta mempertahankan dari invasi yang bersifat langsung dan tidak langsung. Untuk itu perlu diwujudkan diplomasi positif untuk memperoleh lingkungan internasional yang stabil. Disamping dibentuk sistem pertahanan yang dapat menangkal agresi dari luar dan mengalahkannya kalau sampai hal tersebut terjadi, Jepang melakukan berbagai usaha sesuai dengan ketentuan undang dasar dan landasan kebijakan pertahanannya.¹⁶³ Perubahan kebijakan Jepang dapat dikaitkan dengan perubahan kebijakan yang terjadi di negara sekitarnya.

Hal lainnya yang membuat miter Jepang harus menunjukkan eksistensinya adalah pada bulan Desember 2014, eksekusi tawanan Jepang oleh ISIS telah menghidupkan kembali debat publik di Jepang tentang pasifisme negara tersebut pasca perang. Ambisi Tokyo mengenai kontra terorisme merupakan bagian dari penataan kembali yang lebih luas dari angkatan bersenjata Jepang, kata AEI Michael Auslin seorang ahli di

¹⁶² “Dinamika Persenjataan di Asia Timur antara Cina dan Jepang”, *Loc. Cit.*.

¹⁶³ Sayidiman Suryodiprojo, “Jurnal Studi Jepang”, Vol.1. No.1, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991, Hal. 27

American Enterprise Institue. Langkah terbaru oleh Tokyo untuk merevisi kebijakan kontraterorisme yang harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari ambisi militer Perdana Menteri Shinzo Abe.

Selain terorisme, Abe menggaris bawahi bahwa ancaman Korea Utara, kebangkitan Tiongkok, dan ketidakpastian mengenai komitmen AS sebagai aliansi adalah alasan besar untuk peninjauan kembali peran Jepang di dunia. Dan sementara masyarakat tetap menyoroti masalah keamanan, Abe menyatakan telah tumbuh kesadaran akan, "dunia adalah tempat yang semakin berbahaya dan anda tidak bisa hanya mencoba untuk menghindari itu" kata Abe. Dan Mengenai aliansi AS-Jepang, Auslin mengatakan sementara Washington memberikan angin segar perihal Tokyo yang sedang berusaha memandirikan negara dan militernya, politik nasionalis Abe memerlukan sebuah "*delicate balancing act*."¹⁶⁴

Bangkitnya negara Tiongkok dan meningkatnya kapabilitas nuklir Korea Utara memaksa Jepang untuk lebih aktif berperan dalam menghadapi konflik dan dinamika militer yang semakin berkembang di kawasan Asia Pasifik. Normalisasi pertahanan Jepang diharapkan akan membuat satu kekuatan baru yang mampu menekan keagresifan Tiongkok terutama terhadap negara-negara berkembang di kawasan.

Perubahan interpretasi atas konstitusi Jepang telah memperluas hak mempertahankan diri Jepang sehingga memungkinkan militer Jepang untuk menjalankan tindakan-tindakan yang selama ini dilarang

¹⁶⁴“How Shinzo Abe Is Modernizing Japan’s Military” Diakses dari <http://www.defenseone.com/ideas/2015/02/how-shinzo-abe-modernizing-japans-military/105540/> pada 21 Oktober 2015

berdasarkan Pasal 9 Konstitusi Jepang. Dengan reinterpretasi ini, kekuatan militer Jepang akan dimungkinkan untuk terlibat mempertahankan sekutu yang sedang diserang. Reinterpretasi ini juga memungkinkan Jepang untuk berperan lebih besar dalam aliansinya dengan Amerika Serikat yang selama ini sangat terbatas. Pembagian beban yang lebih seimbang telah sejak lama menjadi tuntutan AS terhadap Jepang dalam persekutuan kedua negara itu, dan tidak mengalami penurunan meskipun Pemerintahan Obama menjalankan strategi rebalancing di kawasan Asia Pasifik.

Melalui perluasan peran militernya, Jepang berusaha meyakinkan AS bahwa mereka merupakan sekutu penting dan mampu merespons tuntutan AS. Hal ini menjadi penting mengingat Jepang memiliki kekhawatiran akan melemahnya komitmen AS terhadap keamanan Jepang akibat adanya peningkatan hubungan ekonomi AS-Tiongkok. Beban yang lebih seimbang di antara dua negara sekutu ini, AS-Jepang, akan sangat mempengaruhi perimbangan kekuatan di Kawasan Asia Pasifik, terutama bagaimana Jepang dan AS akan mengelola persoalan Laut Cina Timur dan persoalan lainnya yang menyangkut kepentingan kedua negara.

Semakin luasnya peran yang dapat dijalankan oleh kekuatan militer Jepang tampaknya tidak hanya terbatas akan mempengaruhi perkembangan sengketa di Laut Cina Timur tetapi juga persoalan lainnya yang menjadi kepentingan negara-negara tetangga Jepang di kawasan. Jepang akan dinilai sebagai sekutu potensial bagi sejumlah negara di kawasan, seperti Filipina atau Australia yang juga memiliki kesepakatan

keamanan dengan AS. Negara-negara Asia Tenggara yang memiliki persoalan dengan Tiongkok, seperti Vietnam, akan sangat mungkin untuk mengembangkan kerja sama keamanan dengan Jepang.¹⁶⁵

¹⁶⁵ “Buku Putih Pertahanan Jepang dan Pengaruhnya Terhadap Sengketa Laut Cina Timur”, *Loc. Cit.*